



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/88/2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI WARGA MASYARAKAT KABUPATEN KUDUS TERDAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BEKERJA DI JAKARTA  
DAN TIDAK BISA PULANG KE KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KUDUS,

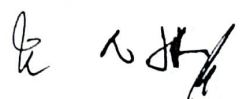
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan kerentanan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan adanya Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Berupa Uang dan Beras Bagi Warga Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tanggal 19 Mei 2020 Nomor 460/1.002/12.02/2020, masyarakat terdampak yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia dana Bantuan Sosial berupa uang dan barang bagi warga masyarakat Kabupaten Kudus terdampak *Corona virus disease 2019 (COVID-19)* yang bekerja di Jakarta dan tidak bisa pulang ke Kudus dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tidak Terduga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial bagi warga masyarakat Kabupaten Kudus terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Bekerja di Jakarta dan Tidak Bisa Pulang ke Kudus Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/52/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Berupa Uang dan Beras Bagi Warga Masyarakat Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus tanggal 19 Mei 2020 Nomor 460/1.002/12.02/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Sosial bagi Warga Masyarakat Kabupaten Kudus Terdampak *Corona virus disease 2019 (covid-19)* yang bekerja di Jakarta dan tidak bisa pulang ke Kudus Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), untuk 33 (tiga puluh tiga) orang masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan dalam bentuk uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan barang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berasal dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, yang diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yakni pada Mei, Juni dan Juli Tahun 2020 dengan ketentuan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus masih berlaku.
- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penganggaran dan penerima bantuan sosial telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.








KELIMA : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang- undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Mei 2020

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 19 Mei 2020

Nomor : 900/88/2020

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI WARGA MASYARAKAT KABUPATEN KUDUS TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BEKERJA DI JAKARTA  
DAN TIDAK BISA PULANG KE KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Sosial						59.400.000
	Bantuan Sosial bagi warga masyarakat terdampak wabah Conona Virus Disease 2019 (COVID-19)						59.400.000
1	Moch. Michael Thoyyib	Dk. Buloh RT2/RW7 Ds. Puyoh Kec. Dawe Kab. Kudus	Jl. Tidore RT4/RW17 Kel.Jombang Kec.Ciputat Kota Tangerang Selatan	3	Bulan	600.000	1.800.000
2	M. Yazid Al Bustomi	Dk. Buloh RT2/RW7 Ds. Puyoh Kec. Dawe Kab. Kudus	Jl. H. Sulaiman gg. Bothin RT01/RW08 Kampung Prigi, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok	3	Bulan	600.000	1.800.000
3	Adi Setiawan Tamzil	Ds. Besito, RT02/RW08 Kec. Gebog Kab. Kudus	Periuk, Periuk Jaya, Tangerang Banten	3	Bulan	600.000	1.800.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	M. Abdul Rozaq	Ds. Tumpangkrasak RT01/RW06 Kec. Jati Kab. Kudus	Kampung Kukun RT12 RW06	3	Bulan	600.000	1.800.000
5	Yeyen Aryanto	Ds. Kajar Kec. Dawe Kab. Kudus	Jl. Raya Grogol, gang Rawa Kalong Villa Mutiara Cinere, Kota Depok	3	Bulan	600.000	1.800.000
6	Mikron	Dk. Kebangsan RT03/RW03 Ds. Getassrabi Kec. Gebog Kab. Kudus	Kp. Rumpak Sinang RT03/RW01 Kelapa Dua, Tangerang	3	Bulan	600.000	1.800.000
7	Bambang Supriyadi	Dk. Tumpangkrasak, RT01/RW02 Ds. Tumpangkrasak, Kec. Jati, Kab. Kudus	Jl. Tiang Bendera III No.70 Jakarta Barat	3	Bulan	600.000	1.800.000
8	Moh. Kasuri	Ds. Karangmalang RT04/RW07 Kec. Gebog Kab. Kudus	Mampang, Jakarta Selatan	3	Bulan	600.000	1.800.000
9	M. Abdul Ghufon	Ds. Kandangmas RT04/RW09 Kec. Dawe Kab. Kudus	Kampung Bogor 2 RT01/RW06 Kelurahan Pusaka Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi	3	Bulan	600.000	1.800.000



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Salamun	Ds. Gondangmanis RT04/RW08 Kec. Bae Kab. Kudus	Kampung Bogor RT01/RW06 Kel.Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi	3	Bulan	600.000	1.800.000
11	Khoirur Rohman	Ds. Getassrabi RT03/RW03 Kec. Gebog Kab. Kudus	Kp.Rumpak Sinang RT03/RW01 Kelapa Dua, Tangerang	3	Bulan	600.000	1.800.000
12	Abdul Rohim	Dk.Winong RT06/RW06 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus	Perum Chandra Indah, Kel.Jatirahayu Kec.Pondok Gede Kab.Bekasi	3	Bulan	600.000	1.800.000
13	Sugito	Dk.Karang Subur RT05/RW05 Kel. Klaling Kec.Jekulo Kab.Kudus	Jl.Transad VI No.8 RT.02 RW.08 Kec.Jati Sampurna Jatirangon Kab.Bekasi	3	Bulan	600.000	1.800.000
14	Agus Jono	Klaling Kambang RT.05 RW.03 Kec.Jekulo Kab.Kudus	Jalan Raya Pasar Kemis Kp.Kebun Kelapa RT04 RW03 Kel.Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Banten	3	Bulan	600.000	1.800.000
15	Maryono Sampri	Dk. Madu RT.01/RW.01 Ds. Cendono Kec.Dawe Kab. Kudus	Kel.Jati Makmur RT.02 RW.019 Kec. Pondok Gede Kab.Bekasi	3	Bulan	600.000	1.800.000
16	Haryanto	Ds. Piji RT.03/RW01 Kec.Dawe Kab.Kudus	Rawa Buaya RT.10/RW.01 Cengkareng-Jakarta Barat	3	Bulan	600.000	1.800.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Gusnanda Tri Prasetyo	Ds. Loram Kulon (Karang Watu) RT.04 RW.02 Kec.Jati Kab.Kudus	Ds. Talaga RT.01/RW.02 Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang - Banten	3	Bulan	600.000	1.800.000
18	Muhammad Nur Fais	Ds. Bulungcangkring RT.03/RW07 Kec. Jekulo Kab. Kudus	Ds. Talaga RT.01/RW.02 Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang - Banten	3	Bulan	600.000	1.800.000
19	Muhammad Chandra Aditya	Dk. Bendo Ds. Mejobo RT.05/RW01 Kec.Mejobo Kab.Kudus	Ds. Talaga RT.01/RW.02 Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang - Banten	3	Bulan	600.000	1.800.000
20	Muhammad Rebo	Ds. Honggosoco RT.03/RW.03 Kec. Jekulo Kab. Kudus	Parung Panjang - Bogor	3	Bulan	600.000	1.800.000
21	Slamet Suharjo	Ds. Tanjungkarang RT.05/RW.05 Kec. Jati Kab. Kudus	Parung Panjang - Bogor	3	Bulan	600.000	1.800.000
22	Muhammad Ahamad	Ds. Tanjungkarang RT.05/RW.05 Kec. Jati Kab. Kudus	Parung Panjang - Bogor	3	Bulan	600.000	1.800.000
23	Heru Wahyudi	Dk. Kadilangon RT.03/RW.08 Ds. Gondangmanis Kec. Bae Kab.Kudus	Citra Indah Clauster Bukit Agung Blok137 No.21 Jonggol, Kab.Bogor	3	Bulan	600.000	1.800.000





NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Muhammad Yuliansyah	Ds. Golantepus RT.04/RW.04 Kec. Mejobo Kab.Kudus	Jl.Raya Pasar Minggu Km.17 No.13 Jakarta	3	Bulan	600.000	1.800.000
25	Sukarpan	Ds. Piji Kec.Dawe Kab.Kudus	Kelurahan Pasir Jaya Kec. Cikupa Kab.Tangerang	3	Bulan	600.000	1.800.000
26	Hudallah	Ds. Singocandi RT.06/RW.01 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus	Jl.Terbang Layang No.01 Pondok Cabe - Tangerang Selatan	3	Bulan	600.000	1.800.000
27	Muntolip	Dk. Paseran RT05/RW08 Ds. Margorejo Kec.Dawe Kab.Kudus	Bogor Sentul , Jalan Tatiya Asri - Cijujung	3	Bulan	600.000	1.800.000
28	Muhammad Budi Chondro	Ds. Pedawang RT05/RW02 Kec. Bae Kab.Kudus	Cikupa, Tangerang	3	Bulan	600.000	1.800.000
29	Lukito	Ds. Besito RT.05/RW.03 Kec.Gebog Kab.Kudus	Jl.Raya Duri Kosambi No.50 kel.Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat	3	Bulan	600.000	1.800.000
30	Teguh	Dk. Lahar Ds. Puyoh RT.04/RW.03 Kec.Dawe Kab.Kudus	Pamulang, Tangerang Selatan	3	Bulan	600.000	1.800.000
31	Hariyanto	Gamong, RT.01/RW.02 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus	Grand Cikarang City 2	3	Bulan	600.000	1.800.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA		VOL	SATUAN	NILAI BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
		DAERAH ASAL	DOMISILI			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Supriyanto	Dk. Getassrabi Kidul RT.05/RW.05 Ds. Getassrabi Kec.Gebog Kab.Kudus	Ds. Priok Rt 2/10 Kec. Priok Jaya Perum Taman Jati Permai Tangerang	3	Bulan	600.000	1.800.000
33	Masudi	Dk. Piji RT3 RW 6 Ds. Piji Kec. Dawe Kab. Kudus	Pondok Kelapa 12 Jl. Manggar1C C Blok G6 No. 6 Jakarta Timur	3	Bulan	600.000	1.800.000

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	